

BAB III

POTENSI ANCAMAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN BAGI INDONESIA

Indonesia memang tidak ikut mengklaim kawasan Laut China Selatan yang sedang disengketakan antara China dan beberapa negara anggota ASEAN. Namun dengan fakta bahwa konflik tersebut terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia, hal itu akan sedikit banyak akan berpengaruh bagi Indonesia.

Dengan melihat fakta bahwa kawasan konflik yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, bersinggungan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di kawasan kepulauan Natuna dan sangat berpotensi untuk terjadi konflik, maka tidak bisaungkiri jika Indonesia pasti akan menerima dampak langsung dari konflik yang terjadi.

A. Kedaulatan

Ada banyak kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa tersebut. Pertama, dari sisi kedaulatan, sebenarnya sebagian wilayah ZEE Indonesia masuk dalam klaim wilayah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna.

Hal yang paling penting dalam isu konflik di kepulauan Natuna ini adalah potensi ancaman bagi pemerintah Indonesia atas klaim pemilikan China terhadap kepulauan Natuna tersebut, karena isu tersebut menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Illegal fishing adalah salah satu bentuk dari ancaman kedaulatan dan ekonomi Indonesia. Namun berbeda dengan kasus illegal fishing pada umumnya, kasus illegal fishing yang terjadi di kawasan kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik sedikit rumit karena ada campur tangan negara didalamnya serta sangat rawan untuk dipolitisasi dan dibelokkan menjadi permasalahan perebutan

wilayah. Berikut ini adalah beberapa contoh permasalahan yang terjadi di kawasan Indonesia yang ditimbulkan akibat dari wilayah Indonesia yang bersinggungan langsung dengan wilayah konflik.

Pada tanggal 24 Februari 2019, angkatan laut Indonesia berhasil menangkap empat kapal pencuri ikan berbendera Vietnam yang beroperasi di sekitar perairan Natuna. Keempat kapal tersebut kedapatan mencuri ikan menggunakan alat tangkap *trawl* di Landas Kontinen Laut Natuna. Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa penangkapan empat kapal Vietnam tersebut menambah catatan panjang kasus pencurian ikan di perairan Indonesia yang dilakukan kapal-kapal berbendera Vietnam. Bahkan, dalam satu bulan terakhir ini, kapal-kapal pencuri ikan dari Vietnam tersebut kerap melibatkan kapal patroli milik pemerintah Vietnam, Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS). Pada saat KRI TOM-357 sedang menggiring ke-4 kapal tersebut, kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS) menerobos masuk ke wilayah ZEE Indonesia dan melakukan maneuver yang mengancam dengan berupaya untuk menghalangi pengawalan 4 (empat) kapal ikan hingga membahayakan KRI TOM-357 (Tempo.co, 2019).

Selang dua hari setelah insiden itu, Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang untuk menyampaikan nota protes. Pakar hukum internasional Prof. Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan insiden yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara itu karena adanya klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Vietnam atas Zona Ekonomi Eksklusif (Mazrieva, 2019).

Sebelum Vietnam melakukan tindakan pengawalan terhadap kapal-kapal pencuri ikannya, hal serupa sudah terlebih dilakuka oleh China. Bahkan tindakan dalam upaya menghalangi penangkapan kapal nelayan yang dilakukan oleh China terbilang lebih propokatif dibandingkan apa yang dilakukan oleh kapal Vietnam. setidaknya ada tiga peristiwa

pada tahun 2010 dan 2013, kapal-kapal patroli Indonesia yang berupaya untuk menahan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok di Laut Cina Selatan dihalang-halangi dan diperintahkan oleh kapal-kapal penegak hukum Tiongkok untuk melepaskan kapal-kapal Tiongkok yang ditahan Indonesia.

Ketegangan Indonesia dan China mengenai pencurian ikan beberapa kali terjadi. Ketegangan ini diperparah dengan fakta bahwa tindakan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan China seolah-olah mendapat dukungan oleh pemerintah China. Pada 2010, kapal penegak hukum maritim asal China meminta kapal patroli Indonesia membebaskan kapal nelayan asal China yang ditangkap lantaran diduga melakukan pencurian ikan. Lalu, pada Maret 2013, sejumlah kapal China yang dilengkapi senjata mengonfrontasi kapal patroli perikanan Indonesia dan menuntut nelayan China yang ditangkap di perairan Kepulauan Natuna dibebaskan. Ketika menanggapi perilaku mengancam kapal-kapal Tiongkok itu, kapal-kapal Indonesia menurut (The Mainichi Daily News, 2010).

Kapal-kapal Tiongkok telah terus memancing di ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, dan pada bulan-bulan terakhir ini kapal-kapal itu telah disertai oleh Kapal-Kapal Pengawas Pantai Tiongkok, sama seperti insiden pada 2010 dan 2013. Tetapi tiga konfrontasi antara kapal-kapal Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2016 patut diperhatikan.

Pada bulan Maret 2016, terjadi insiden ketika kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menangkap sebuah kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah itu merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal tersebut mengejar, melepaskan tembakan peringatan, dan mengamankan kapal pemukat itu, serta menyeretnya kembali ke dermaga. Ketika kedua kapal tersebut mendekati perairan teritorial Indonesia hampir 12 jam

sesudahnya, sebuah Kapal Pengawas Pantai Tiongkok yang besar muncul dan menuntut agar kapal pemukat itu dilepaskan. Saat kapal Indonesia tidak menurut, kapal pengawas Tiongkok menabrak kapal Tiongkok yang sedang ditarik, sehingga memaksa aparat Indonesia untuk melepaskannya.

Para diplomat Tiongkok menelepon para pejabat di Jakarta untuk mendesak agar Indonesia merahasiakan insiden ini, akan tetapi, sebelum rekannya dari Kementerian Luar Negeri dapat menghentikannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti menggelar konferensi pers untuk membeberkan rincian insiden tersebut. Ini merupakan peningkatan dari insiden-insiden sebelumnya pada 2010 dan 2013 saat Indonesia memutuskan untuk tidak mempublikasikan konfrontasi-konfrontasi tersebut. Publikasi peristiwa ini mengakibatkan adanya tekanan politik di dalam negeri agar Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas terhadap penangkapan ikan ilegal oleh Tiongkok.

Pada bulan juni 2016 terjadi insiden serupa di kawasan yang sama. Angkatan Laut Indonesia mengungkapkan bahwa pada awalnya ada 12 kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Namun, kapal-kapal tersebut melarikan diri saat kapal perang Indonesia mendekat. Kapal perang Indonesia lantas mengejar dan mengeluarkan tembakan peringatan dan berhasil menghentikan salah satu dari 12 kapal ikan nelayan yang bebendera China.

Kapal ikan yang ditangkap itu bernama Han Tan Cou 19038 bermuatan 7 orang awak. Kapal ikan Han Tan Cou itu bersama 7 orang awaknya warga negara China kemudian digiring ke Pangkalan TNI AL Ranai untuk diproses secara hukum. Namun saat kapal ikan itu hendak digiring, kapal Coast Guard China bernomor lambung 3303 menghampiri dan lewat komunikasi radio meminta kapal ikan itu dibebaskan. Pihak Coast Guard China saat itu beralasan, kapal-kapal ikan negaranya mencari ikan di *traditional fishing ground* di kawasan *nine dashed line*, jadi bukan di wilayah perairan

Indonesia. Pernyataan mengenai traditional fishing ground pertama kali disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying. Ia mengatakan bahwa kapal nelayan Cina menangkap ikan di tempat yang biasanya dikunjungi nelayan-nelayan Cina sehingga tidak bisa disebut pencurian ikan. Beijing telah membuat protes resmi kepada pemerintah Indonesia atas insiden penembakan dan penangkapan awak kapal Cina tersebut.

Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar Cina di Jakarta sekaligus menyampaikan nota protes terkait aksi kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna. Isi nota protes tersebut, sebagaimana dijelaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menekankan tiga kesalahan yang dilakukan kapal penjaga pantai Cina.

Kesalahan pertama, kapal penjaga pantai melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Indonesia. Selanjutnya, kapal penjaga pantai Cina dinyatakan melanggar penegakan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia. Terakhir, kapal penjaga pantai Cina disebut melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Pihak Beijing tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas tentang sifat klaim yang disiratkan oleh garis putus-putus tersebut. Pernyataan-pernyataan pihak Tiongkok yang paling ekspansif telah menyiratkan bahwa garis putus-putus tersebut menunjukkan suatu klaim pada suatu perairan teritorial, atau pada suatu ZEE. Pernyataan-pernyataan lain telah menyiratkan bahwa garis tersebut hanyalah garis panduan yang menggambarkan klaim-klaim Tiongkok atas hak-hak penangkapan ikan di dalam garis tersebut, atau atas pulau-pulau dan bebatuan di dalamnya, namun tidak pada hak-hak kelautan terpisah apa pun. Tidak seperti negara-negara lain di wilayah tersebut yang terkena dampak garis putus-putus Tiongkok, Tiongkok dan Indonesia tidak berselisih mengenai

kedaulatan atas daratan apa pun. Oleh karenanya, bagi Indonesia, klaim-klaim kelautan Tiongkok di dalam garis putus-putus itulah masalah utamanya (Connelly, 2017).

Para pejabat Indonesia telah berulang kali meminta Tiongkok memperjelas sifat garis putus-putus itu sejak mereka pertama kali mengetahui pada tahun 1993 bahwa garis itu mencakup bagian dari ZEE Indonesia. Pada bulan Juli 2010, Indonesia menulis dalam catatan verbal (note verbale) kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa garis tersebut “*jelas-jelas tidak memiliki basis hukum internasional*”, dan bahwa garis tersebut menimbulkan risiko pembalikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Kelautan atau United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) (Reditio, 2018).

Tindakan tindakan yang dilakukan negara-negara yang bersengketa di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia mengisyaratkan bahwa negara-negara tersebut tidak lagi mengindahkan perbatasan antar negara dan wilayah kedaulatan negara lain.

B. Keamanan

Dari sisi keamanan, jika sengketa tersebut tereskalasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius.

China saat ini merupakan salah satu negara dari tiga negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia, selain Amerika Serikat dan Rusia. Kemampuan dan pengalaman militer China dalam berbagai medan pertempuran memberikan pengaruh kepercayaan diri dan peluang keberhasilan yang cukup besar bagi China apabila terjadi konfrontasi dengan militer Indonesia dalam upaya merebut wilayah kepulauan Natuna. Kekuatan pertahanan Indonesia pada 2014- 2019 hanya mampu menanggulangi seperlima dari kekuatan China pada tahun yang sama. Hal ini berarti Indonesia perlu mewaspadai apabila China sampai menggelar

kekuatannya mendekati 20% di sekitar kawasan Indonesia (Badan Intelijen Negara, 2014).

Pada tahun 2016, pengadilan PBB mendukung Filipina bahwa China telah melanggar hak kedaulatannya di Laut China Selatan. Namun China menolak untuk terikat dengan putusan ini. China memperkuat pernyataan ini dengan membangun pulau-pulau buatan di Laut China Selatan dan menempatkan instalasi militer di Pulau Paracel dan Kepulauan Spratly.

Walau Amerika secara resmi tidak memihak dalam perselisihan di Laut China Selatan (dan lebih suka menghindari pertikaian langsung dengan China) namun Amerika Serikat dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa jika dibutuhkan, dan telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mengarahkan kembali perhatiannya ke Pasifik.

Sementara itu, AS telah menanggapi klaim China dengan "*kebebasan operasi navigasi*" dan menegaskan haknya untuk melintasi perairan internasional dengan mengerahkan kapal perang AS dekat dengan pangkalan China. Hal ini menyebabkan pertemuan yang bermusuhan dan tabrakan yang nyaris terjadi dengan kapal perang China, di mana seorang komandan China bahkan menyarankan serangan terhadap kapal-kapal Amerika yang mengganggu di perairan mereka.

Australia, India, Jepang dan Amerika Serikat, kelompok yang disebut "Quad" itu, kemungkinan besar akan mengambil langkah-langkah tersebut, ketimbang menantang langsung klaim Tiongkok dengan menggoyah sarana militernya di antara ke-500 pulau-pulau kecil di Laut China Selatan.

Stuart Orr, profesor pengelolaan strategi di Universitas Deakin di Australia juga mengatakan bahwa keempat negara itu diduga kuat akan semakin intens mengeluarkan pernyataan keras, membantu saingan-saingan maritim China, dan mengadakan latihan angkatan laut bersama dekat jalur pelayaran yang disengketakan tersebut

Negara-negara tersebut ingin menjaga laut yang kaya sumber-daya alam seluas 3,5 juta kilometer persegi itu tetap terbuka sambil melindungi hubungan ekonomi mereka sendiri dengan Beijing. Sementara itu, banyak negara yang berlayar, menangkap ikan dan mengeksplorasi Laut China Selatan sekarang ini.

Secara umum, bila terjadi konflik terbuka di Laut China Selatan antara China dengan negara-negara lainnya dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional Indonesia.

C. Ekonomi

Perairan di wilayah yang dipersengketakan tersebut adalah wilayah perikanan yang penting dan dasar laut di bawahnya merupakan sumber cadangan-cadangan gas alam yang besar (Connelly, 2017). Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia bagaikan negara raksasa yang masih tidur. Indonesia juga memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju.

Posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi. Pasalnya beberapa selat strategis yang merupakan jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar dan Selat Ombai-Wetar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km persegi.

Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km persegi. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia

mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sumbangan sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) memiliki peranan strategis. Terutama dibandingan sektor lain dalam sektor perikanan maupun PDB nasional. Pada tahun 2008 saja tercatat PDB pada subsektor perikanan mencapai angka Rp 136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasional.

Dengan adanya konflik di Laut China Selatan, maka potensi perekonomian Indonesia yang sedemikian besarnya akan mengalami hambatan dan semakin sulit untuk dikembangkan. Selain itu, Filipina sebagai Negara yang menentang klaim Sembilan garis putus putus Tiongkok pun pada akhirnya mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat pun memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat ingin memperkuat hegemoninya di kawasan Asia Timur dan menggeser hegemoni China. Selain itu, kepentingan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan adalah mengenai kebebasan navigasi di laut internasional. Demi melindungi kepentingannya di kawasan ini, Amerika Serikat kemudian mengirimkan angkatan lautnya untuk berlayar di sekitar kawasan Laut China Selatan. Angkatan laut Amerika Serikat juga beberapa kali tercatat melakukan latihan bersama dengan Filipina dan Jepang di kawasan tersebut. Namun beberapa hal yang paling membuat marah China saat ini adalah ketika AS mengirimkan kapal perang dan pesawat militer ke pulau-pulau yang diklaim Beijing.

Tiongkok dan AS telah berulang kali terlibat konflik strategis terkait okupasi Beijing atas persilangan jalur pelayaran Laut China Selatan. Ketegangan yang terjadi dikawasan Laut China Selatan ini memperparah ketegangan ekonomi yang terjadi antara China dan Amerika Serikat sejak tahun 2018.

Kendati tidak terkait langsung, perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kian memanas itu tetap bisa berdampak serius bagi perdagangan nasional, jika tidak segera disikapi. Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai semakin memanasnya hubungan AS-China juga akan berisiko pada perekonomian kedua negara itu. Pada ujungnya, kondisi tersebut dapat menyeret negara lain yang menjadi mitra dagang kedua negara itu. Pelemahan ekonomi China juga akan berimbas kepada penurunan ekspor RI, seiring dengan menurunnya permintaan dari negara itu. Selain itu Deputi Gubernur Bank Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan pasar keuangan di Indonesiakembali mendapat tekanan akibat ketegangan atau perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Ketegangan yang terjadi berdampak langsung ke banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Dalam kesempatan itu, Andry juga mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia masih dihantui volatilitas akibat sentimen perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat (AS). Kondisi ini menyebabkan nilai tukar yang terus bergejolak dan mudah arus modal keluar. Risiko penurunan permintaan dunia dan kembali meningkatnya tensi perang dagang antara AS dan Cina sekarang ini akan menjadi faktor risiko bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi ke depannya.